

Collaborative Model in Enhancing the Effectiveness of Educational Financing Management at MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta

Handaru Baskara Aji¹, Rosa Kamelia Azizah², Shaleh³
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1,2,3}
*E-mail: 23204092008@student.uin-suka.ac.id

Abstract

Education financing is an important factor in supporting the success of learning in schools. Effective and efficient financing management can improve the quality of education. This research uses descriptive qualitative methods. Informants, including the Principal, Head of Administration, and Treasurer, are the parties involved in policy making and budget management at the school. The instruments used in this research were interview guidelines and documentation in accordance with the research objectives. Data analysis uses the Miles, Huberman, and Saldana model, which involves data condensation, data presentation, and verification to draw conclusions. The results of this research are financing management at MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta which involves three main models: Flat Grant Model, The Resources Cost Model, and Historic Funding Model. Allocation and use of funds is carried out strategically, among others: identifying needs, determining priorities, transparent and accountable management, long-term planning through strategic plan, as well as evaluating and periodically adjusting the budget. Monitoring and control of financing management is carried out as follows. Monitoring is carried out through periodic financial audits, routine financial reports, use of the financial management information system, periodic evaluations, and determination of financial performance indicators that focus on the quality of planning, implementation, and results. Control and prevent errors in budget use, implements mechanisms such as structured budget planning, document verification procedures, periodic monitoring, and transparency through the publication of financial reports. This research focuses on an effective education financing management model to improve the quality of education at MTs Negeri 3 Sleman, Yogyakarta.

Keywords: Collaborative Model, Effectiveness, Financing



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu faktor dalam kemajuan suatu bangsa (Kurniati, Maisah, & Hakim, 2023). Karena pendidikan sangat penting untuk manusia dapat berkembang Fahmy et al., "Strategi Guru Al- Qur ' an Hadist Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Di MTS Qiro ' Atul Qur ' an Sungai Binjai ̇. Tujuan pendidikan merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia (Saidin, Maisah, & Hakim, 2023). Proses kegiatan pendidikan akan terlaksana jika pengelolaan pembiayaan pendidikan dilakukan secara baik. Pembiayaan pendidikan merupakan hal penting guna menunjang keberhasilan dari proses kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah.

Diberbagai negara maju, pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab dari pemerintah negara secara penuh (Mesiono & Haidir, 2021). Hal ini menjadi perbedaan dari sistem negara berkembang yang memberikan prioritas pada anggaran daerah masing-masing untuk pembangunan

pendidikan serta mempersilahkan penggunaan berbagai model pembiayaan yang dapat menguntungkan bagi pendidikan yang ada di daerah masing-masing dari negara berkembang.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendanaan dalam pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Pemerintah atau Pemerintah daerah dapat mendanai satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial. Pemerintah juga dapat memberikan hibah kepada daerah untuk kepentingan Pendidikan. Demikian juga pada Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 49 UU Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan harus dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka dari itu hal ini menjadi upaya pemerintah dalam mendorong kualitas pendidikan yang ada di berbagai daerah dengan mementingkan pembiayaan pendidikan sebagai bentuk penunjang dari keberhasilan program pendidikan.

Secara luas pembiayaan pendidikan merupakan hal yang bersifat kompleks, karena didalamnya terdapat relevansi pada setiap komponennya yang meliputi sumber biaya, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dari hasil yang diukur pada perubahan yang terjadi serta permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Hal ini membuat diperlukannya studi khusus dalam mengenal pembiayaan Pendidikan (Astuti & Danial, 2019).

Untuk dapat merealisasikan pengelolaan dari berbagai sumber biaya pendidikan yang menjadi upaya dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tentu terdapat tantangan dan kendala dalam melakukan pengelolaan pembiayaan pendidikan dengan memperhatikan strategi serta model yang akan digunakan dalam melakukan pengelolaan dana pendidikan di sekolah. Hal ini menjadikan para pelaku pendidikan harus mampu mengembangkan sistem pengelolaan dana pendidikannya sehingga menjadikan lembaga pendidikannya mampu dijadikan sebagai penggerak bagi kemajuan pendidikan yang ada di daerahnya. Karena pada kenyataannya tantangan dan kendala yang dialami diberbagai daerah di Indonesia menjadi alasan belum mampunya lembaga pendidikan untuk merealisasikan. Banyak sekolah yang masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah dalam hal ini penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebagai sumber utama dari pendanaan sekolah, namun sumber tersebut sering kali tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah.

Lembaga pendidikan sebagai penyedia jasa pendidikan memiliki masalah yang sama sebagai produsen dalam bidang usaha lainnya seperti biaya produksi. Akan tetapi terdapat tantangan dan kendala lain khususnya mengenai pengelolaan pembiayaan. J. Hallack berpendapat bahwa terdapat tiga macam tantangan dan kendala yang dialami oleh lembaga pendidikan, diantaranya 1) Definisi produksi pendidikan, 2) Identifikasi transaksi ekonomi dalam pendidikan, 3) Kenyataan pendidikan merupakan sebuah pelayanan umum (Arifudin et al., 2016).

Pengelolaan pembiayaan yang efektif dan efisien akan menjadikan lembaga pendidikan mampu meningkatkan kualitas dari Pendidikan yang diberikan secara efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan segala kegiatan pendidikan memerlukan dana atau pembiayaan. Meskipun pembiayaan dalam pendidikan bukanlah satu-satunya faktor penentu dalam keberhasilan pendidikan yang berkualitas, namun pada kenyataannya tanpa pembiayaan yang baik akan sulit rasanya jika pendidikan dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat (Novan Ardy Wiyani, 2012).

Dalam melakukan pengelolaan pembiayaan di sekolah model-model pengelolaan dan juga strategi harus diketahui bagi para pengelola pendidikan, sehingga hal ini dapat menjadi sebuah rujukan dalam menentukan jalan kegiatan pengelolannya. Karena pada dasarnya Pendidikan merupakan sebuah investasi sumber daya manusia yang memiliki nilai ekonomis berupa sumbangan asas manfaat bagi pembangunan sosial dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, dan produktivitas (Istiyarini & Hanif, 2024). Hal ini tentu menjadi salah satu hasil

dari upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan pembiayaan yang efektif dan efisien. Karena salah satu aspek yang menjadi penting dalam memajukan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan adalah aspek pembiayaan pendidikan (Nafisah, Widiyanto, & Sakitri, 2017).

Pendidikan yang memiliki kualitas menjadikannya sebagai investasi yang sangat mahal. Dalam hal ini kesadaran para stakeholder untuk dapat menanggung pembiayaan pendidikan pada dasarnya akan memberikan kekuatan rasa tanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai salah satu sektor publik yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung dengan memberikan pengajaran, bimbingan dan latihan yang diberikan kepada para peserta didik (Istiyarini & Hanif, 2024). Maka dari itu, karena memiliki manfaat yang begitu luas dan menyebar ke berbagai aspek, pembiayaan pendidikan harus menjadi fokus utama dan wajib diberikan perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat.

Isu pembiayaan dalam pendidikan seperti ini menjadi menarik karena dapat memberikan dampak yang begitu besar bagi kualitas pendidikan. Menurut Elchanan Chon dalam Arwildayanto (2017) pembiayaan dalam pendidikan yakni dengan mengidentifikasi dan mengukur nilai ekonomis untuk pendidikan, alokasi sumber biaya dalam pendidikan, gaji tenaga pendidik, biaya pendidikan dan perencanaan dalam pendidikan.

Upaya sekolah dalam mencapai peningkatan efektivitas dan efisiensi sekolah harus dengan cara mengoptimalkan biaya pendidikan yang dikelola dengan baik untuk memaksimalkan proses dan hasil pendidikan (Ayu, Girindratta, Nurfadillah, Fariz, & Mashur, 2024). Maka dari itu, langkah-langkah dalam manajemen pembiayaan juga perlu diperhatikan dengan seksama. Setidaknya terdapat 4 model pembiayaan pendidikan, diantaranya: 1) Subsidi penuh dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi; 2) Pendidikan gratis diberikan kepada peserta didik hingga usia tertentu; 3) Pendidikan gratis diberikan sampai tingkat menengah atas dan pendidikan tinggi tetap dibebankan SPP sekalipun menerima subsidi dari pemerintah; 4) Seluruh jenjang pendidikan membiayai lembaganya sendiri dengan dana yang bersumber dari kerja sama, atau memanfaatkan CSR (Corporate Social Responsibility), membentuk keanggotaan alumni dan memanfaatkan sumber dana dari orangtua/wali peserta didik (Maliki, Sadali, & Murtafiah, 2022).

Pada dasarnya tujuan dari pembiayaan pendidikan adalah untuk meningkatkan efektivitas sekolah dengan mengacu visi dan misi sekolah sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pembiayaan dari kegiatan sekolah guna mencapai tujuannya. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas tentang model kolaboratif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pembiayaan Pendidikan di MTs Negeri 3 Sleman, Yogyakarta.

a. Model Pembiayaan Pendidikan

1. Model Dana Bantuan Murni (*Flat Grant Model*)

Model ini merupakan pembiayaan pendidikan bersumber dari bantuan negara yang dibagikan pada sekolah di daerah tanpa memperhitungkan pendapatan hasil daerah setempat.

2. Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Model*)

Model ini merupakan model pembiayaan yang bersumber dari pemerintah negara dengan mempertimbangkan pendapatan hasil kekayaan daerah. Daerah yang tergolong miskin akan mendapatkan lebih banyak dari daerah yang Makmur (Ekowati, Sunandar, & Murniati, 2019).

3. Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (*Guaranteed Tax Base Plan*)

Model ini menentukan penilaian per peserta didik yang menjadi jaminan dari negara dan diperuntukan bagi seluruh daerah. Dalam penerapannya pembagian presentase sekolah di daerah miskin akan mendapatkan dana sangat tinggi dan sekolah daerah kaya akan mendapatkan sangat rendah.

4. Model Persamaan Presentase (*Persentage Equalizing Model*)

Model ini lebih banyak memberikan sumbangan kepada tiap peserta didik dan guru ke daerah yang terbelakang. Model pembiayaan ini dihitung per peserta didik, guru atau komponen lain sesuai dengan kebutuhan dari program yang dilaksanakan.

5. Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*)

Model ini memiliki sumber dana yang berasal dari daerah yang kaya berdasarkan pajak yang didapatkan, Kemudian pemerintah negara menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan bantuan kepada daerah yang terbelakang dalam konteks pendidikan.

6. Model Pendanaan Negera Sepenuhnya (*Full State Funding Model*)

Model ini merupakan rancangan dengan pendanaan sekolah bersumber dari negara dan diberikan kepada setiap daerah-daerah dengan besaran dana yang sama. Model ini menggunakan asas keadilan dan tidak melihat berdasarkan besaran pendapatan daerah yang menerima pendanaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari anak masyarakat miskin tidak putus pendidikan sehingga berpotensi menciptakan pengangguran dan kurang sejahteranya generasi selanjutnya.

7. Model Sumber Pembiayaan (*The Resources Cost Model*)

Model ini menyediakan proses pembiayaan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi ekonomi yang berbeda-beda dari setiap daerah. Selain itu, model ini tidak berkaitan dengan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan pajak suatu daerah.

8. Model Surat Bukti atau Penerimaan (*Models of Choice and Voucher Plans*)

Model ini menyediakan surat bukti dan voucher kepada individu yang membutuhkan sumbangan biaya pendidikan berdasarkan permintaan dari sekolah. Peserta didik yang menerima voucher menjadi penerima subsidi langsung dalam pembiayaan pendidikan.

9. Model Rencana Bobot Siswa (*Weight Student Plan*)

Model pembiayaan pendidikan ini mempertimbangkan dari aspek kebutuhan peserta didik berdasarkan proporsinya. Semisal proporsi untuk peserta didik yang disabilitas, peserta didik yang memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik dan lain sebagainya.

Selain itu, menurut pendapat dari Arwildayanto (2017) terdapat model pembiayaan lain yang banyak diterapkan oleh sekolah-sekolah, diantaranya; 1) Model Berdasarkan Usulan (*Bidding Model*) yakni sekolah dapat mengajukan usulan kepada pihak terkait, kemudian usulan tersebut diteliti oleh pihak terkait dan disesuaikan dengan kriterianya. 2) Model Berdasarkan Kebijakan (*Discretion Model*) yakni sumber dana melakukan studi untuk dapat mengetahui komponen yang diperlukan berdasarkan kebutuhan prioritas dari objek yang diteliti. 3) Model Berdasarkan Pengalaman (*Historic Funding*) yakni model pembiayaan yang berorientasi pada acuan penerimaan dana tahun lalu, dengan hanya dilakukannya penyesuaian.

b. Alokasi dan Penggunaan Anggaran

Menurut Mujayaro dan Rohmat (2020) pengalokasian atau distribusi anggaran pendidikan adalah suatu rencana penetapan jumlah dan prioritas uang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pendidikan disekolah. Dalam rangka pengalokasian dana pendidikan selalu mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), yang penyusunannya bisa dilakukan secara rutin tiap satu tahun sekali dan bisa dilakukan tiap semester sesuai dengan tahapan-tahapan penyusunan anggaran. Kunci utama dari pengelolaan pembiayaan pendidikan mengacu pada strategi yang digunakan dalam merancang dan menetapkan RAPBS (Irma Susanti & Yusuf Muslihin, 2024). Hasil penelitian dari Ma'sum (2023) mengatakan bahwa terdapat strategi dalam pengalokasian dana Pendidikan yang efektif diantaranya: 1) Identifikasi kebutuhan; 2) Prioritaskan Penggunaan Dana; 3) Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel; 4) Perencanaan jangka panjang; 5) Evaluasi dan penyesuaian alokasi dana.

Metode

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena tertentu daripada mengukur sesuatu. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali informasi mendalam mengenai persepsi, pengalaman, atau pandangan informan (Sugiyono, 2021). Selain itu, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menjabarkan hasil temuan secara

deskripsi di lapangan. Objek penelitian kali ini adalah Kepala Sekolah sebagai pemangku kebijakan tertinggi di sekolah, Kepala Tata Usaha sebagai pengawas dalam perencanaan dan Bendahara sebagai pengelola pembiayaan pendidikan di sekolah. Data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami berbagai informasi yang berasal dari jurnal, buku dan artikel terkait.

Peneliti memastikan bahwa pengumpulan data dapat menghasilkan data yang akurat dan konsisten. Dalam penelitian kualitatif, validitas lebih berfokus pada keterkaitan data dengan fenomena yang diteliti, sementara realibilitas berhubungan dengan konsistensi data yang dihasilkan (Yusuf, 2017). Dalam pemilihan instrument yang digunakan pada penelitian ini, peneliti memilih seperti 1) Pedoman wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. 2) Pengumpulan data yaitu wawancara dan pengumpulan dokumentasi. 3) Pengelolaan data seperti mengelompokkan, atau Menyusun data sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2015). Alasan memilih instrument wawancara dan dokumentasi bertujuan untuk memahami pandangan mendalam informan terkait pengelolaan keuangan di MTs N 3 Sleman. Analisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang berisi kondensasi data, display data (menyajikan data), dan verifikasi (menarik kesimpulan).

Hasil dan Pembahasan

1. Model Pengelolaan Pembiayaan Kolaboratif di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta

Tahapan dalam implementasi model yang diterapkan oleh MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta merujuk kepada beberapa langkah yang diambil secara sistematis untuk dapat mengimplementasikan model pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam konteks tertentu. Jika model pengelolaan pembiayaan tidak direncanakan dengan baik akan mengakibatkan dana pendidikan tidak tepat sasaran, salah dalam pengelolaan, tidak adanya pengawasan, akuntabilitas yang rendah, tidak ada sanksi tegas, sehingga tidak ada efek jera serta menciptakan moral rendah dalam pengelolaan biaya pendidikan (Mesiono & Haidir, 2021).

Langkah yang digunakan oleh MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta ini dimulai dengan, 1) Analisis kebutuhan, yang disertai dengan perencanaan dan mempertimbangkan karakteristik serta kondisi kebutuhan sekolah. 2) Pemilihan model yang akan diterapkan untuk melakukan implementasi dengan mengikutsertakan pengorganisasian sumber daya serta penetapan prioritas. 3). Evaluasi, untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan dari implementasi model yang digunakan. Dalam implementasinya, sangat penting untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan dan dinamika yang terjadi di sekolah, agar model pengelolaan yang digunakan tetap relevan dan efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Wirian (2022) yang mengatakan bahwa sumber dana pendidikan yang melimpah tidak akan menjadi sebuah jaminan dalam meningkatkan kualitas pendidikan jika dalam implementasinya tidak direncanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, diketahui bahwa di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta terdapat 3 model dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, antara lain; 1) Model Bantuan Murni atau Flat Grant Model, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara MTs 3 Negeri Sleman Yogyakarta yang mengatakan bahwa keseluruhan sumber dana pendidikan yang diperoleh sekolah berasal dari Pemerintah yakni berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 2) Model Sumber Pembiayaan atau The Resources Cost Model, hal ini berdasarkan pendanaan yang diterima oleh MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta berasal dari pajak yang dihasilkan oleh daerah setempat guna membantu pembiayaan pendidikan yang ada di sekolah daerah tersebut. Biasanya dana ini disebut dengan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA). 3) Model Berdasarkan Pengalaman atau Historic Funding, hal ini berdasarkan pengelolaan pembiayaan yang ada di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta beracuan pada penerimaan dana tahun sebelumnya dalam pembuatan pengajuan anggaran, serta dilakukannya beberapa penyesuaian seperti komponen yang dibutuhkan, jumlah komponen dan besaran anggaran.

Dalam model pengelolaan pembiayaan pendidikan agar berjalan secara efektif dilakukan cara dengan mengintegrasikan beberapa komponen utama diantaranya;

a) Perencanaan Anggaran Berbasis Kebutuhan

Proses ini dimulai dengan cara menyusun anggaran dengan skala prioritas berdasarkan kebutuhan spesifik sekolah yang berlandaskan tujuan strategis pendidikan. Dalam implementasinya perencanaan memiliki beberapa tahapan, antara lain; 1) Identifikasi kebutuhan. 2) Prioritisasi penggunaan dana. 3) Pengelolaan anggaran. 4) Perencanaan jangka Panjang. 5) Evaluasi (Ma'sum et al., 2023).

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, perencanaan anggaran berbasis kebutuhan di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta memiliki fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dengan cara mengutamakan kebutuhan peserta didik dalam hal akademik seperti pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang proses kegiatan pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Data menunjukkan bahwa dalam rincian kertas kerja satker 2024 mengalokasikan pembiayaan pendidikan dengan memprioritaskan kepada satuan kerja guna keberlangsungan program dari Waka Kesiswaan, Waka Kurikulum dan Waka Sarpras.

b) Alokasi Anggaran Berbasis Hasil

Alokasi anggaran berbasis hasil merupakan rencana dalam menetapkan jumlah dan prioritas uang yang akan digunakan untuk pelaksanaan pendidikan di sekolah (Mujayaro & Rohmat, 2020) dengan berfokus pada capaian indikator kinerja yang telah ditentukan serta evaluasi keberhasilan sebagai alat ukurnya.

Penetapan indikator kinerja keuangan di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta merupakan sebuah langkah dalam membuat perencanaan jumlah yang dibutuhkan serta prioritas utama dalam pelaksanaan program pendidikan di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta. Dari hasil temuan di lapangan, diketahui bahwa MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta melakukan beberapa langkah, diantaranya; 1) Menetapkan indikator hasil yang bertujuan untuk mengukur peningkatan keberhasilan efektivitas program sekolah. 2) Melakukan monitoring penggunaan dana dengan tujuan memastikan alokasi dana yang digunakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. 3) Melakukan evaluasi capaian guna mengukur tingkat keberhasilan dan untuk menentukan alokasi penganggaran biaya program pendidikan di masa mendatang.

c) Keterlibatan Pemangku Kepentingan di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta

Keterlibatan para pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, bendahara, komite, serta orang tua atau wali peserta didik merupakan metode yang paling efektif dalam mengikutsertakan pada proses pengelolaan pembiayaan pendidikan berjalan sesuai dengan rencana (Merisa & Safitri, 2023). Sehingga, menciptakan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara dan Kepala Tata Usaha, dalam proses keterlibatan para pemangku kepentingan di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta mengikutsertakan peran dari 1) Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan 2) Bendahara, dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan serta bertanggung jawab atas laporan yang akuntabel dan transparan. 3) Komite sekolah, dalam pengawasan dan pertimbangan pada proses penentuan kebijakan pendidikan di sekolah. 4) Orang tua atau wali peserta didik.

2. Strategi Pengalokasian dan Penggunaan Dana di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta

a) Strategi Alokasi Dana yang Efektif di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta

Pengalokasian atau distribusi anggaran pendidikan adalah suatu rencana penetapan jumlah dan prioritas uang yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pendidikan di sekolah (Mujayaro & Rohmat, 2020). Dalam rangka pengalokasian dana pendidikan selalu mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), yang penyusunannya bisa dilakukan secara rutin tiap satu tahun sekali dan bisa dilakukan tiap semester sesuai dengan tahapan-tahapan penyusunan anggaran. Adapun strategi pengalokasian dana Pendidikan yang efektif sebagai berikut: 1) Identifikasi kebutuhan; 2) Prioritaskan Penggunaan Dana; 3) Pengelolaan anggaran yang transparan

dan akuntabel; 4) Perencanaan jangka panjang; 5) Evaluasi dan penyesuaian alokasi dana (Ma'sum et al., 2023).

Dalam implementasinya di Mts Negeri 3 Sleman Yogyakarta strategi alokasi dana yang digunakan meliputi beberapa langkah strategi, diantaranya: a) Identifikasi kebutuhan yang dilakukan di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta melalui rapat dengan beberapa perwakilan mulai dari Waka Kurikulum, Kesiswaan, Sarpras, dan Humas. Pada rapat tersebut dibahas mana yang menjadi prioritas dan sangat urgent maka hal itu yang didahulukan. Beberapa langkah seperti pada Kurikulum dan Pembelajaran dana harus dialokasikan untuk pengembangan kurikulum yang relevan, pembelian buku, keperluan ujian, dll. Pada Sarana dan Prasarana sekolah perlu memiliki ruang kelas yang aman dan nyaman, fasilitas olahraga, laboratorium dan ruang perpustakaan. Prasarana yang baik mendukung proses pembelajaran yang efektif, dll; b) Memprioritaskan penggunaan dana, langkah selanjutnya yang dilakukan MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta, Bendahara bersama dengan Kepala Sekolah dan Kepala TU menentukan prioritas mana yang lebih mendesak atau paling berdampak pada kualitas Pendidikan di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta. MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta sangat memprioritaskan kebutuhan peserta didik kemudian setelah kebutuhan peserta didik terpenuhi maka prioritas selanjutnya itu untuk guru atau pegawai non-ASN; c) Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta mengutamakan pentingnya untuk mengelola dana dengan transparansi agar semua pihak termasuk guru, orang tua, dan Masyarakat dapat memahami bagaimana dana digunakan dan apa hasil yang dicapai transparansi dana yang dilakukan di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta dengan cara menempelkan rancangan anggaran di papan informasi yang ada di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta; d) Perencanaan jangka panjang, biasa dikenal dengan Rencana Strategi (Renstra), MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta yang biasanya dibuat dalam periode empat tahun sekali dimana renstra tersebut terdiri dari semua aspek-aspek yang mendukung peningkatan kualitas Pendidikan mulai dari kurikulum hingga humas semuanya terangkup ke dalam Renstra tersebut; e) Evaluasi dan penyesuaian alokasi dana, setelah dana dialokasikan evaluasi secara berkala dilakukan untuk menilai apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau penyesuaian anggaran di masa depan. Evaluasi yang dilakukan di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta dilakukan Ketika terjadinya ketidaksesuaian anggaran dengan realisasi lapangan seperti kebutuhan dana darurat Pendidikan, penyesuaian yang dilakukan dengan cara membuat skala prioritas oleh kepala sekolah, kepala TU, dan beberapa Satker lainnya mana yang lebih berpengaruh pada peningkatan kualitas dan siswa maka hal itu menjadi prioritas utama dalam penyesuaian periode selanjutnya.

b) Penyesuaian Dana untuk Memaksimalkan Hasil dengan Sumber Daya yang Terbatas di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta

Dalam proses penyesuaian penggunaan dana untuk memaksimalkan hasil dari pendidikan dengan sumber daya yang terbatas, dibutuhkan beberapa langkah-langkah sebagai upaya dalam penyesuaian pembiayaan pendidikan dengan sumber daya yang terbatas (Syahrani et al, 2024), antara lain: 1) Identifikasi dan prioritas kebutuhan, 2) Penggunaan teknologi untuk efisiensi, 3) Pengembangan dan pelatihan guru secara efektif, 4) Penguatan kolaborasi dan dukungan eksternal. 5) Penggunaan dana cadangan untuk kebutuhan tak terduga, 6) Evaluasi dan penyesuaian anggaran secara berkala, 7) Efisiensi operasional dan penghematan biaya, 8) Pemantauan penggunaan dana secara transparan.

Pada proses penerapan penggunaan dana untuk memaksimalkan sumber daya yang terbatas di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta mengambil langkah sebagai berikut: a) Identifikasi dan prioritas kebutuhan, dengan sumber daya yang terbatas MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta berfokus pada kebutuhan yang mendesak dan berdampak langsung pada kualitas Pendidikan, seperti mengutamakan kebutuhan akademik, mengutamakan sarana dan prasarana yang memadai untuk keselamatan dan kenyamanan peserta didik dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di sekolah; b) Penguatan kolaborasi dan dukungan eksternal, MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta

memaksimalkan hasil pendidikan dengan dana terbatas yang dilakukan dengan cara mencari dukungan tambahan pendanaan dari pihak eksternal, seperti pengadaan dana kegiatan yang diperoleh dari orang tua peserta didik untuk dapat membantu proses keberlangsungan kegiatan program pendidikan yang ada di sekolah, sehingga keterbatasan yang dialami tersebut tidak menjadi penghalang atau penghambat dalam proses kegiatan pembelajaran di sekolah; c) Penggunaan dana cadangan untuk kebutuhan tak terduga, MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta melakukan penyesuaian penggunaan dana cadangan yang bersumber dari dana yang sudah di alokasikan. Dalam penggunaan dana Cadangan untuk kebutuhan tak terduga dilakukan dengan cara merevisi perencanaan yang sudah dialokasikan setiap 3 bulan sekali dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas yang bersifat mendesak; d) Efisiensi operasional dan penghematan biaya, MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta melakukan penghematan biaya dengan cara menyewa setiap kali kebutuhan yang bersifat insidental, seperti contoh melakukan sewa komputer untuk mengurangi pemborosan biaya perawatan, pemeliharaan dan perbaikan jika terdapat kerusakan; d) Pemantauan penggunaan dana secara transparan, dalam pelaksanaannya MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta melakukan pelaporan berkala setiap satu bulan kepada kepala sekolah, serta pelaporan kepada pemangku kepentingan lainnya yang dilakukan dengan cara menempelkan hasil anggaran di papan informasi sekolah. Pelaporan tersebut berupa dana alokasi pembiayaan pendidikan dalam rincian berupa besaran anggaran, sumber dana dan nominal penggunaan.

3. Pemantauan dan Pengendalian Model Pengelolaan Pembiayaan di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta

a) Metode Pemantauan di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta

Proses kegiatan pemantauan atau pengawasan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk dapat mengetahui secara rinci dan mendalam tentang realisasi program pendidikan yang bersumber dari penggunaan dana pendidikan. Dalam proses tersebut terdapat tahapan seperti; 1) Audit keuangan berkala; 2) penggunaan laporan keuangan rutin; 3) penggunaan system informasi manajemen keuangan (SIMKeu); 4) evaluasi berkala oleh tim pengawas atau komite keuangan; 5) penetapan indicator kinerja keuangan; 6) pengawasan berbasis komunitas dan transparansi public.

Berdasarkan hasil temuan di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta, diketahui bahwa proses kegiatan pemantauan dalam pengelolaan pembiayaan menggunakan metode sebagai berikut:

1) Audit keuangan berkala

Audit keuangan adalah salah satu metode pemantauan utama yang bertujuan untuk meninjau dan mengevaluasi penggunaan dana secara mendalam. Audit keuangan dibagi menjadi audit internal yaitu audit yang dilakukan oleh tim internal Lembaga Pendidikan atau bagian keuangan sekolah, biasanya dilakukan setiap bulan atau per kuartal. Sedangkan audit eksternal dilakukan oleh pihak ketiga yang meninjau keuangan Lembaga secara objektif, biasanya dilakukan setahun sekali untuk memberikan pandangan yang independent terhadap pengelolaan keuangan (Masrianda, 2022).

Peninjauan dan evaluasi yang dilakukan oleh MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta yaitu dengan cara laporan bulanan, laporan ketercapaian program dan laporan pertanggung jawaban yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan, mendukung perencanaan strategis, serta meningkatkan kolaborasi antara guru, staf, kepala sekolah dan pihak lainnya.

2) Penggunaan laporan keuangan rutin

Laporan keuangan yang disusun secara rutin memungkinkan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penggunaan dana. Beberapa laporan keuangan yang dapat digunakan: laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal (Tarigan & Suhariyanti, 2022). Dalam pelaksanaannya MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta menggunakan system pelaporan bulanan yang dilakukan kepada kepala sekolah dan kepala Tata Usaha serta pelaporan tahunan yang dilakukan dengan cara menempelkan penggunaan dana Pendidikan di papan informasi sekolah hal

tersebut dilakukan dalam rangka penguatan transparansi dana kepada semua pihak termasuk orang tua peserta didik.

3) Penggunaan system informasi manajemen keuangan (SIMKeu)

Sistem informasi keuangan yaitu pendukung manajer keuangan dalam pengambilan Keputusan yang menyangkut persoalan keuangan Perusahaan dan pengalokasian serta pengendalian sumber daya keuangan dalam Perusahaan (Rohman & Pratama, 2022). Pada penerapannya di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta memilih langkah maju dalam digitalisasi pengelolaan keuangan Pendidikan. Dengan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang ditingkatkan, integrasi data, serta monitoring real-time sehingga dapat memudahkan dalam memantau realisasi anggaran secara langsung tanpa menunggu laporan manual.

4) Evaluasi berkala oleh tim pengawas atau komite keuangan

Memverifikasi pengeluaran, dan melakukan penyesuaian. Metode yang dilakukan oleh MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta yaitu metode pengawasan dalam bentuk evaluasi berkala yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta kepala TU dan guru lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, membangun kepercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas sekolah, serta mendukung pengambilan Keputusan yang lebih baik di sama depan.

5) Penetapan indicator kinerja keuangan

Indikator yang dapat digunakan dalam pemantauan keuangan di Lembaga Pendidikan: Rasio solvabilitas yaitu kemampuan sebuah Lembaga untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya. Rasio Profitabilitas yaitu Gambaran tentang efisiensi Perusahaan dalam mengelola sumber daya dan menghasilkan laba. Rasio aktivitas yaitu pengukuran kinerja keuangan dengan rasio aktivitas, rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai seberapa efisien suatu Lembaga dalam menggunakan sumber dayanya (Pulungan et al., 2023). Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi indicator pelaksanaan anggaran yang digunakan MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta yaitu 1) kualitas perencanaan anggaran; 2) kualitas pelaksanaan anggaran; dan 3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Ketiga indicator tersebut membantu memastikan bahwa anggaran yang direncanakan dengan baik, dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, dan memberikan hasil yang optimal bagi Lembaga.

b) Peran Kepala Sekolah dalam Memantau Penggunaan Dana serta Menjaga Transparansi Anggaran di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta

Pengawasan yang diberikan oleh kepala sekolah secara internal didalam suatu sekolah, dengan didalamnya terdapat upaya mengevaluasi dan memberikan pemahaman terhadap setiap penanggung jawab tentang pengeluaran dan kebutuhan sekolah dalam lingkup pembiayaan. Peran kepala sekolah dalam pengawasan meliputi pengelola utama anggaran, perencanaan dan pengambil keputusan, pelaporan serta menjamin transparansi dan akuntabilitas (Ariskawanti & Munastiwi, 2022). Peran kepala sekolah di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta meliputi bagian dalam pengelolaan anggaran, perencanaan, dan pengambilan Keputusan.

c) Alat Pemantauan dalam Pengelolaan Pembiayaan di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta

Laporan bulanan, bertujuan untuk memberikan Gambaran terperinci tentang pemasukan dan pengeluaran di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta dalam satu bulan yang berisi tentang 1) rincian pemasukan baik dari pemerintah berupa BOSNAS dan BOSDA serta dana kegiatan yang berasal dari orang tua peserta didik. 2) rincian pengeluaran mulai dari kegiatan operasional, pembelian barang, pengadaan layanan, dll.

d) Mekanisme Pengendalian untuk Mencegah Kesalahan dalam Penggunaan Anggaran di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta

- 1) Perencanaan anggaran yang terstruktur, langkah yang dilakukan MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta pada tahap ini yaitu Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Sekolah (RAPBS) secara partisipatif, melibatkan kepala sekolah, Waka kurikulum, Waka sarpras, Waka kesiswaan, Waka Humas, Kepala TU dan Bendahara sekolah.

- 2) Prosedur Verifikasi dan Persetujuan, MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta melakukan verifikasi dan persetujuan dengan cara melengkapi dokumen pendukung seperti nota-nota atau kwitansi, mendapat persetujuan dari kepala sekolah dan kepala TU.
 - 3) Laporan dan Monitoring Berkala, MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta melakukan laporan bulanan kepada kepala sekolah, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan rapat yang diadakan ketika adanya ketidaksesuaian dana dalam pengeluaran sehingga hasil evaluasi tersebut berguna bagi peningkatan pengelolaan keuangan selanjutnya.
 - 4) Transparansi, MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta melakukan transparansi dana dengan membuka laporan penggunaan dana kepada publik, melalui papan pengumuman atau madding sekolah.
- e) Sistem Pelaporan Berkala di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta
- 1) Komponen utama dalam system pelaporan, 1) laporan pemasukan meliputi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan dana kegiatan. 2) laporan pengeluaran meliputi rincian pengeluaran dengan pos anggaran seperti pengadaan barang, kegiatan belajar mengajar, perawatan fasilitas, dll disertai dengan bukti nota atau kwitansi pembayaran.
 - 2) Frekuensi pelaporan, 1) pelaporan bulanan yaitu laporan keuangan disusun setiap bulan untuk internal sekolah seperti kepala sekolah dan kepala TU. 2) pelaporan triwulan yaitu penyusunan laporan keuangan apabila ada dana terpakai yang tidak sesuai dengan rancangan. 3) pelaporan tahunan yaitu laporan akhir tahun yang diadakan baik dengan kepala sekola, kepala TU, beserta guru.
 - 3) Format pelaporan, 1) dokumen fisik yaitu cetakan laporan yang disimpan sebagai arsip sekolah. 2) digital yaitu laporan yang dibuat menggunakan aplikasi baik excel maupun SAKTI yang di pegang kendali juga oleh kepala sekolah dan kepala TU.
- f) Evaluasi Berkala di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta
- Evaluasi yang dilakukan di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta tersebut dilaksanakan dengan cara membuat pelaporan dan pertanggung jawaban untuk dapat melaporkan pengelolaan pembiayaan pendidikan secara intern sesuai dengan petunjuk teknis. Seperti dalam halnya pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah dengan teknis dana BOS Nomor 80 Tahun 2015. Dalam evaluasinya dilakukan setiap bulan, triwulan dan tahunan dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui rapat bersama kepala sekolah, bendahara, dewan guru, ketua komite dan orang tua peserta didik. Akan tetapi dalam tahap evaluasi di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta tidak memiliki langkah-langkah yang jelas dalam proses evaluasi. Evaluasi yang dilakukan hanya jika terjadi kesalahan dalam anggaran kemudian dilakukan revisi.

Simpulan

Pengelolaan pembiayaan di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta dilakukan dengan tiga model utama: Flat Grant Model (dana BOS), The Resources Cost Model (dana BOSDA), dan Historic Funding Model (acuan anggaran tahun sebelumnya). Proses pengelolaan dimulai dari analisis kebutuhan, pemilihan model implementasi, hingga evaluasi untuk keberlanjutan. Komponen utama dalam pengelolaan meliputi perencanaan anggaran berbasis kebutuhan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, serta alokasi anggaran berbasis hasil dengan penetapan indikator kinerja, monitoring, dan evaluasi capaian. Keterlibatan para pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan orang tua peserta didik juga menjadi elemen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pembiayaan.

Pengelolaan alokasi dan penggunaan dana di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta dengan melakukan Strategi alokasi dana mencakup: identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas, pengelolaan

transparan dan akuntabel, perencanaan jangka panjang melalui Renstra, serta evaluasi dan penyesuaian anggaran secara berkala.

Pemantauan dan pengendalian pengelolaan pembiayaan di MTs Negeri 3 Sleman Yogyakarta, tahap pemantauan dilakukan melalui audit keuangan berkala, laporan keuangan rutin, penggunaan sistem informasi manajemen keuangan (SIMKeu), evaluasi berkala, dan penetapan indikator kinerja keuangan yang fokus pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Untuk pengendalian dan pencegahan kesalahan dalam penggunaan anggaran, MTs Negeri 3 Sleman menerapkan mekanisme seperti perencanaan anggaran yang terstruktur (RAPBS), prosedur verifikasi dokumen, monitoring berkala, dan transparansi melalui publikasi laporan keuangan.

Agar pengelolaan pembiayaan menjadi lebih efektif, MTs Negeri 3 Sleman perlu menyusun langkah-langkah evaluasi yang lebih sistematis dan terjadwal. Evaluasi harus dilakukan tidak hanya saat terjadi kesalahan dalam anggaran, tetapi juga secara berkala untuk menilai kinerja dan efektivitas alokasi dana dalam mencapai tujuan pendidikan. Penerapan evaluasi yang terstruktur dapat membantu mengidentifikasi masalah lebih dini dan melakukan perbaikan segera.

Daftar Rujukan

- Alif Al Ghifari Pulungan, Inggrit Syahla Octalin, & Ratih Kusumastuti. (2023). Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Pada Kinerja Keuangan PT.Telkon Indonesia Tbk (Periode 2020-2022). *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 247–261. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v2i2.984>
- Arifudin, O., Sonia, N. R., Darmawan, P. A., R, J. S. A. A., Abbas, D. S., & Saputro, A. N. C. (2016). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*.
- Ariskawanti, E., & Munastiwi, E. (2022). Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Ma ' arif Wadaslintang. *Pendidikan Riset Dan Konseptual*, 6(3), 442–450.
- Arwildayanto. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan (Jilid 1; U. Kuswandi, Ed.)*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Astuti, A., & Danial, R. (2019). Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Membangun Budaya Madrasah Yang Kondusif di Madrasah Aliyah Negeri. *Journal of Islamic Education Management*, 5(1), 31–45.
- Ayu, D. M., Girindratta, R., Nurfadillah, N., Fariz, F., & Mashur, M. Al. (2024). Strategi Pengelolaan Keuangan Sekolah Untuk Meningkatkan Efisiensi Sumber Daya. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1596–1603.
- Br Tarigan, M. P., & Suhariyanti, S. (2022). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Pada Yayasan Pendidikan Smp Swasta 17 Agustus Desa Tiga Juhar Kecamatan Stm Hulu Kabupaten Deli Serdang. *Worksheet : Jurnal Akuntansi*, 2(1), 61–68. <https://doi.org/10.46576/wjs.v2i1.2618>
- Ekowati, E. T., Sunandar, S., & Murniati, N. A. N. (2019). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar Islam AR Rahmah Kecamatan Suruh. *Jurnal Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang*, 8(1). <https://doi.org/10.26877/jmp.v8i1.5368>
- Fahmy, U., Gustila, D., Putri, A., Fadhil, M., & Yudha, M. (2023). Strategi Guru Al- Qur ' an Hadist Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di MTS Qiro ' atul Qur ' an Sungai Binjai. 1, 9–25.
- Irma Susanti, P., & Yusuf Muslihin, H. (2024). Strategi Kepala Sekolah Mengelola Dana Pendidikan Menjadi Kunci Utama Peningkatan Mutu Sekolah Principal Strategy Managing Educational Funds Being The Main Key To Improving School Quality. 24(1), 51–63. Retrieved from <https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69277>
- Istiyarini, P., & Hanif, M. (2024). Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan) di SMP Negeri 2 Karanglewas. *Global: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 51–60. <https://doi.org/10.37985/cw37dv81>
- Kurniati, D., Maisah, & Hakim, L. (2023). Strategi Lembaga Pendidikan Islam Dalam Menghadapi

- Standar Operasional Pendidikan (Studi di MTsN 3 Tulungagung, Jambi). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 83–98. <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.112>
- Ma'sum, T., Jayanti, D., & Nikmah, D. M. (2023). Strategi Penyusunan Anggaran Pendidikan. *Cermin Jurnal*, 3(1), 61–67. Retrieved from <https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/cjmp>
- Maliki, M., Sadali, I., & Murtafiah, N. H. (2022). Analisis Model-Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Lembaga Sekolah. *Jurnal Manajemen & Pendidikan Islam*, 01(04), 169–178.
- Masrianda. (2022). *Jurnal administrasi pendidikan. Jurnal Administrasi Pendidikan*, 5(1), 3–5.
- Merisa, N., & Safitri, B. (2023). Pengawasan Penggunaan Dana Pendidikan di Sekolah. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 81–88. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.218>
- Mesiono, M., & Haidir, H. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan). *Hikmah*, 17(2), 61–73. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v17i2.88>
- Miles, M. B., Matthew B. Miles, A. M. H., & Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis*. In K. Perry (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (3rd ed., Vol. 11). California: SAGE Publications. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUS_AT_STRATEGI_MELESTARI
- Mujayaroh, M., & Rohmat, R. (2020). Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Pendidikan di Lembaga Pendidikan. *Arfannur*, 1(1), 41–54. <https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.151>
- Nafisah, D., Widiyanto, & Sakitri, W. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Aliyah. *Economic Education Analysis Journal*, 6(3), 788–797. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj>
- Novan Ardy Wiyani. (2012). Desain Manajemen Pendidikan Karakter. *Jurnal Insania*, Vol 17(1), 140.
- Rohman, A., & Pratama, F. I. (2022). Sistem Informasi Manajemen Keuangan pada Herosoftmedia Berbasis Web. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 4(1), 72. <https://doi.org/10.36499/jinrpl.v4i1.5951>
- Saidin, Maisah, & Hakim, L. (2023). Urgensi Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 10–17. <https://doi.org/10.61104/alz.v1i2.86>
- Sugiyono, S. (2021). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D (Catatan Ke)*. Yogyakarta.
- Syahrani, D. F. (2024). *Cendekia pendidikan. Cendekia Pendidikan*, 4(4), 50–54.
- Wirian, O., Agustina, N., & Siahaan, A. (2022). Model-Model Pembiayaan Pendidikan. *Educate: Journal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(1), 44–56. <https://doi.org/10.56114/edu.v1i1.211>
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.